

BAB V

Penutup

5.1. Kesimpulan

PKI lahir sebagai organisasi kepartaian yang memiliki banyak tujuan. Di samping untuk menguasai politik domestik negara, PKI juga memiliki misi untuk menghapus pengaruh kapitalisme guna mewujudkan revolusi sosialis di Indonesia, berangkat dari agenda yang dirintis oleh Komunisme Internasional. Melalui delapan program yang diusung disiplin partai, PKI bercita-cita untuk mewujudkan kemerdekaan penuh atas kapitalisme. Hal ini direalisasikan dengan upaya mempersatukan buruh dan tani serta melakukan pendidikan kepada rakyat melalui pendidikan sosialisme.

PKI digagas atas beberapa intelektual organik sebagai otak dan organisator perjuangan partai. Paham komunisme diperkenalkan oleh Henk Sneevliet, seorang komunis yang berkebangsaan Belanda. Kepengurusan PKI juga dilanjutkan oleh Semaoen dan Darsono yang masing-masing sebagai ketua dan wakil partai. Di sisi lain, Tan Malaka juga pernah mewakili PKI dalam struktur keorganisasian di dalam Komintern.

Pada dasarnya, cita-cita PKI adalah agenda yang memperhatikan kepentingan rakyat karena bertujuan untuk menciptakan masyarakat tanpa kelas. Namun, karena PKI juga merupakan anggota dari Komintern, PKI sangat kaku dalam menafsirkan metode perjuangan yang sesuai untuk dilakukan di Indonesia. Komintern yang berpatron kepada keberhasilan Revolusi Bolsheviks lewat perjuangan bersenjata, dijadikan cetak biru untuk juga dilakukan di negara lainnya. Hal inilah yang menjadi latar belakang PKI melakukan dua kali pemberontakan di tahun 1926 dan 1948. Pemberontakan dilakukan dengan dalih

melakukan revolusi dan menata ulang pola pemerintahan domestik agar tidak terjerat kapitalisme. Tetapi, pemberontakan ini gagal total dikarenakan cara kekerasan tidak cocok untuk dilakukan di Indonesia. Selain pemberontakan yang tidak terkonsolidasi di seluruh daerah Indonesia, pemberontakan PKI juga tidak memiliki cukup massa untuk merealisasikan tujuan. Kegagalan agenda pemberontakan membuat PKI sangat terpojok dan pamor partai menjadi menurun.

PKI memasuki era baru ketika dipimpin oleh D.N. Aidit sebagai ketua, M.H. Lukman sebagai Wakil Sekjen I dan Njoto sebagai Wakil Sekjen II. Tiga serangkai yang dijuluki sebagai *The Three Musketeers* ini mereorganisasi intern partai ke bentuk yang lebih akomodatif dan terstruktur. PKI membangun jaringan partai dengan mendirikan komisar-komisaris di berbagai daerah di nusantara. Di sisi lain, PKI juga mempengaruhi beberapa organisasi *underbouw* yang meliputi setiap dimensi kehidupan masyarakat. Kader PKI aktif di organisasi seperti BTI (tani), SOBSI (buruh), Bintang Merah (jurnalis), Lekra (budayawan), Gerwani (wanita), Pemuda Rakyat (pemuda) dan CGMI (mahasiswa). Organisasi-organisasi tersebut menjadi perpanjangan tangan PKI guna menancapkan pengaruh yang lebih besar terhadap masyarakat.

Sejak dikomandoi oleh Aidit, Lukman dan Njoto, PKI menjelma menjadi kekuatan politik yang besar ditandai dengan keberhasilan hasil pemilu 1955. Tujuan komunisme untuk menciptakan masyarakat tanpa kelas menjadi alasan utama PKI mendapat tempat di tengah rakyat, terkhusus kaum tani dan buruh yang notabene memiliki taraf hidup yang jauh dari kata sejahtera. Di sisi lain, PKI dibekali kemampuan untuk melakukan propaganda ke masyarakat dan orang-orang yang terpengaruh menaruh simpati terhadap

tujuan partai. Menghapus pengaruh kapitalisme menjadi dasar bagi PKI untuk mewujudkan Indonesia yang benar-benar merdeka dan berdaulat sebagai negara.

Dengan momentum Pemilu 1955, PKI berpotensi untuk melakukan revolusi sosialis dalam konteks perlawanan terhadap kapitalisme yang secara historis telah membelenggu tatanan ekonomi politik di Indonesia. PKI yang secara prinsip ideologis sangat bertentangan dengan nilai-nilai kapitalisme menjadi kekuatan politik yang berpengaruh. Di samping PKI memiliki kader-kader yang menduduki DPR dan Dewan Konstituante, anggota PKI juga dibekali dengan kemampuan agitasi yang mumpuni hingga ke elemen akar rumput paling bawah. PKI juga tidak lupa dengan cita-cita untuk merevolusi struktur internasional yang masih dibelenggu kapitalisme, dengan menggiring tatanan politik di Indonesia ke arah yang lebih sosialis.

Berangkat dari hasil Pemilu 1955 pula, PKI menyadari bahwa perjuangan bersenjata yang berhasil dilakukan di Uni Soviet tidak cocok untuk direalisasikan di Indonesia. Langkah-langkah revolusioner yang lebih kultural cenderung diterima oleh masyarakat Indonesia kala itu. Selain melakukan perjuangan lewat kader-kader yang duduk di parlemen, PKI juga mengorganisir organisasi-organisasi yang berada dalam koridor yang sama dengan PKI. Dengan organisasi *underbouw* tersebut, PKI memiliki posisi tawar tersendiri dalam melegitimasi pengaruhnya hingga ke masyarakat akar rumput demi tujuan merubah sistem di negara dan struktur internasional.

Soekarno sebagai Presiden Indonesia kala itu, juga menyadari bahwa PKI merupakan kekuatan politik yang besar dan harus diperhitungkan guna mengamankan kekuasaan serta mengakomodir setiap ideologi yang ada. Oleh karena itu, Soekarno dengan semboyan Nasakom, berupaya untuk mengkonsolidasikan setiap ideologi politik yang dominan, agar

mampu bersinergi merumuskan rangkaian agenda politik. Tetapi, itikad Soekarno yang sangat memperhitungkan kekuatan komunisme dihalangi oleh elemen Angkatan Darat yang sejak tragedi PRRI/Permesta tidak memiliki hubungan yang baik dengan PKI. Hal ini yang dimanfaatkan Amerika Serikat guna mempertahankan kekuatan kapitalisme di tanah air. Amerika Serikat gencar untuk melakukan bantuan militer terhadap AD karena dengan adanya PKI, kepentingannya sebagai negara kapitalis besar akan sangat sulit untuk bertahan di tanah air. Terbentuklah semacam hubungan mutualisme antara Amerika Serikat dengan AD untuk menghancurkan PKI.

Pada dasarnya, ideologi komunisme yang menjadi aktualisasi politik PKI memiliki nilai kesamarataan sebagai tujuan revolusi sosialis. Hal ini menjadi suatu kewajiban apabila golongan-golongan yang menganggap dirinya tertindas menjadikan PKI sebagai partai yang dapat memperbaiki struktur kenegaraan hingga dinamika sosial masyarakat. Tendensi ekonomi yang menjadi landasan permasalahan menjadi pokok utama agenda perjuangan terhadap hegemoni kapitalisme.

Namun, melihat dari beberapa agenda yang dilakukan PKI, ada hal-hal yang harus diurai lebih lanjut menyangkut kehidupan masyarakat banyak. PKI sangat berpatron terhadap Uni Soviet yang merasa memiliki otoritas dalam mengawasi setiap agenda organisasi komunisme yang ada di dunia. Perjuangan komunisme yang terkonsolidasi dalam bentuk Komunisme Internasional, sangat kaku melihat apa saja yang dirumuskan Uni Soviet karena dianggap berjasa besar dalam perkembangan komunisme itu sendiri. Oleh karena itu, andai kata Indonesia dapat dikuasai oleh komunisme dalam konteks struktur negara, cita-cita Indonesia untuk merdeka penuh mendapatkan pertanyaan besar. Akan ada struktur baru yang menguasai pola perpolitikan di Indonesia dan agen baru yang

menjajah wilayah tanah air. Hal ini dikarenakan apabila kita melihat komunisme yang diimplementasikan PKI, tidak berbasis kepada identitas Indonesia sebagai negara. Indonesia yang multikultur tidak bisa dianggap merdeka apabila tersusun atas pola-pola yang cenderung sentralistik dan dimulai dengan cara-cara kekerasan seperti yang pernah dilakukan oleh PKI.

Berangkat dari UUD 1945 bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, maka Indonesia sebagai negara yang telah memproklamkan kemerdekaan harus mampu merumuskan konsep-konsep dasar negara berdasarkan identitas kebangsaan itu sendiri. Dalam memahami identitas kebangsaan semestinya harus berangkat dari pemahaman tentang Indonesia yang dibangun atas kultur-kultur yang berbeda dengan keragaman kearifan lokal. Akan sangat tidak sesuai apabila Pancasila yang bermakna dalam dan menyeluruh, diimplementasikan dengan langkah-langkah yang sentralistik dan diawali dengan kekerasan. Secara konsep, komunisme memiliki nilai-nilai untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, tetapi sangat sulit untuk menentukan langkah kongkrit guna menciptakan tatanan tanpa kelas tersebut. Oleh karena itu, komunisme sebagai ideologi cenderung utopis karena sangat sulit untuk mengawinkan antara nilai-nilai komunisme dalam tatanan ide dengan cara-cara yang dapat direalisasikan.

Namun, komunisme yang berangkat dari pikiran-pikiran Marx bukannya tidak memiliki warisan pengetahuan untuk dijadikan landasan berpikir. Marxisme yang salah satunya diterjemahkan dalam ideologi komunisme, memiliki dasar-dasar pemikiran yang dirasa mampu untuk disinergikan antara ide dengan material. Landasan berpikir tersebut terangkum dalam materialisme dialektika dan historis. Materialisme sebagai filsafat

kebendaan memberikan kontribusi untuk berpikir ilmiah berdasarkan dinamika sosial yang nyata terjadi. Dialektika menggiring kepada pemahaman bahwa dinamika sosial itu dinamis, maka harus ada proses transformasi dialogis dalam menanggapi setiap permasalahan sosial tersebut. Historis mengacu kepada kejadian-kejadian yang berupa fakta sebagai pertimbangan dalam mengambil sintesa berdasarkan kronologis sebuah realitas.

Sejarah komunisme adalah salah satu dari sekian banyak sejarah kalam bangsa Indonesia. Komunisme menjadi terlarang berdasarkan tragedi 1965, yang pada dasarnya tragedi tersebut harus dikaji lebih lanjut dan dipandang secara objektif menyangkut kompleksitas kepentingan pada saat itu. Walaupun komunisme memiliki banyak kontradiksi dan ketidaksesuaian dengan kultur Indonesia, namun PKI dengan komunisme pernah menjadi suatu kekuatan politik yang mempengaruhi perjalanan kehidupan negara. Sejarah tersebut harus dipandang dengan keobjektifan agar nantinya bangsa Indonesia mampu menjadi bangsa yang besar tanpa dihantui oleh beban-beban sejarah.

5.2. Saran

Dinamika PKI dalam konteks politik Indonesia di masa lampau pada dasarnya tidak lepas dari pengaruh ideologi negara-negara luar yang bertujuan untuk memperluas pengaruh. Kapitalisme yang ingin dilawan oleh PKI pada dasarnya tumbuh secara historis mulai dari zaman kolonial hingga era globalisasi seperti saat sekarang ini. Di sisi lain, PKI juga tidak serta merta lepas dari kontrol negara luar dalam melakukan perlawanan terhadap kapitalisme itu sendiri. Oleh karena itu, sebagai ilmuan hubungan internasional, kita semestinya bisa melihat bagaimana dinamika PKI serta pandangan terhadap ideologi

komunisme hingga hari ini sebagai fenomena yang tidak lepas dari struktur global yang kompleks dengan berbagai macam kepentingan di dalamnya.

Selain itu, dalam meneliti dinamika PKI dan komunisme di Indonesia, peneliti selanjutnya semestinya mampu mengelaborasi lebih jauh lagi bagaimana pengaruh Komintern terhadap PKI di Indonesia. Hal menjadi sangat penting karena dalam perkembangannya, PKI yang terkoordinasi dengan Komintern terkadang terdistorsi kepentingannya dengan keadaan di Indonesia dalam konteks perjuangan demi revolusi. Oleh karena itu, mengidentifikasi pola hubungan antara PKI dan Komintern sangat perlu untuk diteliti lebih lanjut merunut pada pasang surut pola koordinasi antara keduanya.

